

ABSTRAK

Dalam masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, badan usaha baik badan usaha jasa, dagang, maupun manufaktur yang terpuruk semakin lama semakin banyak jumlahnya. Tak terkecuali juga industri komponen otomotif. Walau demikian, para pengusaha di sektor ini masih berusaha optimis. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan baku industri otomotif berasal dari lokal sehingga rata-rata harga komponennya hanya naik 10 %.

Harga komponen otomotif dari luar negeri yang mahal dan sulit didapat membuat para pengusaha komponen dalam negeri merasa perlu untuk membuat komponen dengan harga yang relatif murah namun berkualitas bagus.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, dalam melakukan aktivitasnya, badan usaha tidak boleh menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, badan usaha memerlukan suatu alat pengendalian yang umumnya disebut Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang disusun untuk menyediakan kepastian yang masuk akal (*reasonable assurance*) sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Sistem pengendalian internal yang baik adalah yang memiliki sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan suatu badan usaha, adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian, dan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Badan usaha yang menjadi obyek studi ini adalah PT "Humphrey" yang berlokasi di Surabaya. PT "Humphrey" merupakan badan usaha manufaktur yang memproduksi komponen otomotif yaitu berupa *cylinder liner, setting* dalam berbagai jenis dan ukuran serta produk-produk pesanan sesuai dengan jenis dan ukuran yang diminta.

Dalam kegiatan operasinya, PT "Humphrey" berusaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Karena masih menggunakan manajemen keluarga yang bersifat tradisional, dalam melakukan aktivitas pembelian, PT "Humphrey" banyak melakukan perangkapan fungsi. Selain itu, aliran dokumen dan catatan akuntansi badan usaha juga kurang memadai.

Tujuan studi ini adalah untuk membahas sistem pengendalian internal yang diterapkan di badan usaha PT "Humphrey" untuk aktivitas pembelian bahan baku yang masih menggunakan manajemen keluarga yang bersifat tradisional, dan juga untuk memberikan masukan dan informasi

bagi PT "Humphrey" mengenai sistem pengendalian internal badan usaha dan diharapkan informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh PT "Humphrey" sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan di masa yang akan datang

Dari analisis struktur organisasi PT "Humphrey", ditemukan bahwa PT "Humphrey" melakukan perangkapan fungsi hampir pada setiap fungsi yang ada pada organisasi. Perangkapan fungsi yang dilakukan oleh PT "Humphrey" adalah perangkapan fungsi secara vertikal antara fungsi pengawasan, fungsi operasional, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan. Perangkapan fungsi seperti ini memungkinkan terjadinya kecurangan, terutama pada perangkapan pada aktivitas pembelian, penerimaan, dan penyimpanan. Aktivitas pembelian bahan baku yang dapat dilakukan oleh dua bagian dapat mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam pertanggungjawaban. Ini berarti belum terdapatnya pemisahan tanggung jawab fungsi yang secara tegas menjamin pengendalian internal PT "Humphrey". Pemisahan aktivitas produksi, antara produksi dari bahan mentah ke setengah jadi dan bahan setengah jadi ke jadi sudah dilakukan dengan benar.

Dari analisis prosedur pembelian, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan prosedur pembelian PT "Humphrey" lebih banyak mengarah ke arah yang praktis dan mengabaikan pentingnya dokumen dan laporan. Hal ini dilihat dari inisiatif pembelian bahan baku berasal dari tiga bagian, aktivitas pembelian dapat dilakukan oleh dua bagian. Prosedur penerimaan bahan baku juga tidak efektif karena bahan baku yang dibeli tidak pernah ditimbang ulang. Manajer hanya menyetujui barang yang diterima bagian penerimaan tanpa dilakukan pemeriksaan ulang atas kuantitas dan kualitas barang. Dokumen yang kurang layak ditandai dengan hanya membuat satu lembar order pembelian, tidak membuat laporan penerimaan barang.